

Judul : Kemiskinan Ekstrem Dituntaskan Pada 2024
Tanggal : Rabu, 13 April 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 10

Kemiskinan Ekstrem Dituntaskan pada 2024

Pemerintah menargetkan dapat mengatasi kemiskinan ekstrem pada tahun 2024. Sejumlah anggota Komisi V DPR RI berharap data acuan akurat sehingga program tidak salah sasaran.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menargetkan dapat mengatasi sepenuhnya kemiskinan ekstrem di Indonesia tahun 2024. Terkait hal itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan penanganan di 212 kabupaten/kota pada tahun 2022.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/4/2022), menyatakan, pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2024 melalui koordinasi lintas kementerian di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) serta Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Tahun lalu, angka kemiskinan ekstrem di Indonesia tercatat 4 persen dari jumlah ke-

luarga Indonesia. Tahun ini, pemerintah menargetkan penanganan kemiskinan ekstrem diprioritaskan pada 212 kabupaten/kota dengan menyasar total 22.386.202 keluarga.

Penanganan Kementerian PUPR antara lain berupa dukungan infrastruktur, seperti program infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) dan program penyediaan perumahan. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diarahkan untuk menangani kemiskinan ekstrem.

Pada setiap kabupaten/kota akan dipilih lima kecamatan dan dua desa serta dua rukun tetangga/rukun warga (RT/RW) yang tidak memiliki rumah layak huni terbanyak sebagai lokus prioritas. "Saat ini sedang dilakukan pendalaman atas kesiapan lokasi pelaksanaan dan jenis penanganan yang pelaksanaan fisiknya akan dimulai Juni 2022," ujarnya.

Basuki menambahkan, data

BKKBN menjadi basis dalam penetapan lokus kawasan dengan kemiskinan ekstrem dan rekapitulasi jumlah keluarga dengan indikator, antara lain fasilitas lingkungan tidak sehat, keluarga tidak memiliki sumber air minum utama yang layak, tidak mempunyai jamban layak, serta rumah tidak layak huni.

Kemiskinan ekstrem merujuk pada masyarakat berpenghasilan setara dan di bawah 1,9 dollar AS per kapita per hari. Kriteria lain untuk menetapkan kemiskinan ekstrem mencakup prevalensi tengkes tinggi, pelayanan sanitasi rendah, keluarga tak memiliki sumber air minum utama yang layak, tidak punya jamban layak, rumah tidak layak huni, serta termasuk dalam target penanganan kawasan kumuh 2020-2022.

Penanganan kemiskinan ekstrem dilaksanakan dalam tiga tahap, yakni prioritas pada 35 kabupaten di 7 provinsi pada tahun 2021, 212 kabupaten/ko-

ta di 25 provinsi pada tahun 2022, dan 514 kabupaten/kota di 34 provinsi pada tahun 2023-2024. Program IBM yang disiapkan meliputi penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas), sanitasi berbasis masyarakat (sanimas), pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (pisew), dan kota tanpa kumuh (kotaku).

Program BSPS

Adapun program BSPS merupakan bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk meningkatkan kualitas rumah, prasarana, sarana, dan utilitas umum. Penerima BSPS adalah MBR yang memiliki tanah, belum memiliki rumah, dan berpenghasilan maksimal sebesar upah minimum provinsi.

Anggota Komisi V dari Fraksi Partai Gerindra, Sudewo, mengemukakan, kemiskinan ekstrem perlu diperjelas di tingkat

kecamatan, kelurahan, RT, atau RW. Hal itu diperlukan agar program tepat sasaran. Sudewo menilai data yang dipakai Kementerian PUPR dari BKKBN kerap tidak sesuai realitas. "Kalau data ini dipakai sebagai acuan akan menjadi preseden buruk. Timbul kecemburuan karena warga yang seharusnya tidak mendapatkan (bantuan) justru mendapatkan," ujarnya.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Hermanto, mengatakan perlu prosedur standar operasi terkait mekanisme penentuan penerima bantuan program PUPR. "Ini mengingat kondisi di masyarakat yang terus mengalami perubahan," katanya.

Basuki mengemukakan, pihaknya sejauh ini melakukan verifikasi data BKKBN, melalui kerja sama dengan BKKBN dan Kemenko PMK. Program penanganan kemiskinan ekstrem dilaksanakan setelah melalui verifikasi data. (LJKT)